

## KEBIJAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI POLISI DI INDONESIA

Rina Khairani Pancaningrum<sup>a</sup>, Ufran<sup>b</sup>, Amiruddin<sup>c</sup>

<sup>abc</sup>Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: <sup>a</sup>rinakhairani@unram.ac.id, <sup>b</sup>ufran@unram.ac.id, <sup>c</sup>amiruddin@unram.ac.id

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan bentuk korupsi yang dilakukan oleh petugas polisi ketika berperan sebagai penegak hukum di lapangan serta strategi kontrol korupsi polisi agar bisa mewujudkan polisi bebas korupsi. Aturan hukum di sebagian besar negara tidak memasukkan kejahatan yang secara eksplisit disebut “korupsi polisi”. Korupsi polisi adalah salah satu bentuk pelanggaran polisi dimana aparat penegak hukum melanggar kontrak politik mereka dan menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi. Jenis korupsi ini mungkin melibatkan satu atau sekelompok petugas. Korupsi yang dilakukan oleh internal polisi merupakan tantangan terhadap kepercayaan publik, koheisi kebijakan, hak asasi manusia dan pelanggaran hukum yang melibatkan konsekuensi serius. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini apa penyebab dan bentuk korupsi yang dilakukan oleh petugas polisi di lapangan dan bagaimana strategi kontrol korupsi polisi agar bisa mewujudkan polisi bebas korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Titik fokus penelitian ini adalah pada upaya mengetahui penyebab korupsi polisi. Oleh karena itu, penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian hukum yang bersifat dogmatika yang lebih dekat dengan penelitian yang bersifat positivis. Hasil dari penelitian ini adalah pertama sifat dari kepolisian berarti bahwa potensi korupsi selalu ada - ada banyak aspek yang melekat pada kepolisian yang membuatnya rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Kedua, dan untuk memperkuat poin yang telah dibuat sebelumnya, menangani korupsi tidaklah mudah, dengan berbagai faktor yang terlibat harus diimbangi dengan berbagai tindakan pencegahan dan investigasi.

**Kata Kunci:** *Korupsi; Polisi; Perpolisian.*

### *Abstract*

*This study aims to identify the causes and forms of corruption committed by police officers when acting as law enforcers in the field as well as police corruption control strategies to create a corruption-free police force. The legal code in most countries does not include crimes explicitly called “police corruption”. Police corruption is one form of police misconduct where law enforcement officials violate their political contract and abuse their authority for personal gain. This type of corruption may involve one or a group of officers. Internal police corruption poses a challenge to public trust, policy coherence, human rights, and legal violations with serious consequences. The issues to be examined in this research are the causes and forms of corruption committed by police officers in the field and how to control police corruption to achieve a corruption-free police force. This research is normative legal research. The focus of this research is on efforts to understand the causes of police corruption. Therefore, this research is very different from dogmatic legal research which is closer to positivist research. The results of this research are first, the nature of policing means that the potential for corruption always exists - there are many aspects inherent in policing that make it vulnerable to various forms of misconduct. Second, and to reinforce the point made earlier, tackling corruption is not easy, with various factors involved needing to be balanced with various preventive and investigative measures.*

**Keywords:** *Corruption; Police; Policing.*

## A. PENDAHULUAN

Hampir tidak ada lembaga kepolisian yang sepenuhnya bebas dari korupsi.<sup>1</sup> Sanja dengan merangkum berbagai temuan penelitian empiris menuturkan perilaku korup petugas polisi sangat bervariasi dari “secara sistematis memeras uang dan bantuan dari pemilik beberapa restoran dan klub malam, mengumpulkan dan berbagi keuntungan illegal dari para penjahat terorganisir, menyimpan uang, senjata, dan obat-obatan yang disita, menanam bukti palsu dan memalsukan laporan, berkonspirasi untuk mendistribusikan kokain, dan bekerja sebagai pengawal bersenjata untuk apa yang mereka anggap sebagai pengiriman narkoba organisasi penjahat internasional. Lebih lanjut, Sanja menjelaskan bahwa aturan hukum di sebagian besar negara tidak memasukkan kejahatan yang secara eksplisit disebut “korupsi polisi”.

Penjelasan di atas, memperlihatkan korupsi polisi merupakan persoalan yang cukup kompleks dan tak diragukan lagi menjadi isu utama di banyak negara.<sup>2</sup> Sayangnya, apa yang dikemukakan beberapa pakar tersebut belum menjadi kerisauan bersama. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penelitian ini untuk mengisi dan menyusun semacam kerangka kerja konseptual tentang gambaran korupsi polisi saat ini. Tantangan pertama dan utama adalah merumuskan secara memadai apa yang dimaksud dengan korupsi polisi khususnya dikaitkan dengan konteks Indonesia.

Secara sederhana korupsi polisi dapat didefinisikan sebagai: *‘the misuse of authority by a police officer in a manner designed to produce personal gain for the officer or for others’*.<sup>3</sup> Singkatnya, penyalahgunaan otoritas oleh petugas polisi dengan cara tertentu yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan pribadi bagi petugas atau orang lain. Korupsi polisi dapat terjadi di mana saja dalam organisasi kepolisian apa saja atau area tertentu yang berbahaya sekalipun. Korupsi polisi oleh Punch dibedakan dalam empat bentuk yaitu; Korupsi langsung (*straightforward corruption*), yang merupakan tindakan (atau sengaja lamban) untuk mendapatkan hadiah; korupsi strategis (*strategic corruption*), di mana seorang petugas polisi secara aktif menstimulasi kejahatan dan memeras uang atau barang; korupsi yang memberantas (*combative corruption*), di mana polisi menggunakan cara ilegal atau tidak etis untuk memperkuat kasus mereka; dan terakhir, korupsi sebagai penyelewengan keadilan (*corruption as perverting justice*), yang motivasinya adalah balas dendam atau menghindari penuntutan.<sup>4</sup>

Fenomena korupsi polisi dalam konteks Indonesia tergambar secara menarik dalam catatan seorang Indonesianis, Quah yang mengemukakan<sup>5</sup> bahwa korupsi sudah menyebar luas karena polisi mendapatkan alokasi anggaran yang tidak adil. Petugas kepolisian digaji cukup rendah dan rekrutmen dan promosinya bukan berdasarkan kemampuan melainkan dengan menyuap yang menyebabkan korupsi yang dilakukan petugas polisi tidak terdeteksi atau dihukum. Diperburuk dengan perilaku korups yang ditoleransi oleh banyak masyarakat Indonesia. Konsekuensinya, para pembuat kebijakan di Indonesia hanya bisa meminimalkan korupsi polisi tanpa memiliki kemampuan dan kapasitas politik untuk mengintroduksi pelaksanaan reformasi yang mengalamatkan pada kelima sebab tersebut.

Analisis Quah tersebut di atas diperkuat oleh fakta seperti yang diungkapkan oleh Koran Tempo pada Tanggal 2 November 2022 dengan headline berita yang cukup tegas, ‘Mengapa

<sup>1</sup>Lihat Police Corruption Trial, 1988, at A9, Peterson, 1999, p. B5, Shepardson, 1998, p. 1, Rollenhagen, 1998, Locy, 1994, p. B1, Locy, 1994, p. B1, dalam Sanja Kutnjak vkovi, Irena Cajner-Mraovi, *The Measurement Of Seriousness Of Police Corruption*, This paper appears in Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice, edited by Gorazd Mesko, Milan Pagon, and Bojan Dobovsek, and published by the Faculty of Criminal Justice, University of Maribor, Slovenia. <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/Mesko/207997.pdf>

<sup>2</sup>M.Punch, *Police Corruption: Deviance, Accountability And Reform In Policing*, Cullompton: Willan. 2009.

<sup>3</sup>H. Goldstein, *Policing A Free Society*. Cambridge, MA: Ballinger, 1977.

<sup>4</sup>M Punch, *Police Corruption: Deviance, Accountability And Reform In Policing*, Cullompton: Willan, 2009; Lihat Juga Francis Pakes, *Comparative Criminal Justice*, 2nd Edition, Willan Publishing, 2010, Hlm. 15-16.

<sup>5</sup>J.S.T. Quah, “Combating Police Corruption In Indonesia: Cleansing The Buaya (Crocodile)”, *Asian Education And Development Studies*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 129-143. <https://doi.org/10.1108/AEDS-04-2018-0088>

gaya Hidup Mewah Polisi Patut Dicurigai Bersumber dari Korupsi”<sup>6</sup>. Jauh sebelumnya, Kompas, salah satu media terbesar di Indonesia juga menurunkan berita terkait dengan gaya hidup mewah polisi yang tidak sesuai dengan profil gaji dan pendapatan seorang polisi.<sup>7</sup> Bahkan Presiden secara terbuka melakukan kritik terhadap Polri yang diakibatkan beberapa peristiwa luar biasa yang terjadi baru-baru ini yang disinyalir sebagai perilaku korup.<sup>8</sup> Misalnya jenderal polisi bintang dua terlibat dugaan peredaran narkoba.<sup>9</sup>

Sejalan dengan berbagai fakta tersebut, kompleksitas problematika korupsi polisi juga terlihat dengan gamblang pada penjelasan, Davies, dkk. dalam artikel, *Covering Cops: Critical Reporting of Indonesian Police Corruption* yang menganalisis hasil pemberitaan The Jakarta Post tentang korupsi polisi dalam rentang beberapa tahun terakhir. Cabaran mereka memberi gambaran bahwa korupsi polisi di Indonesia sudah menyebar secara massif dalam tubuh kepolisian. Perilaku korup polisi ini terjadi pada penanganan kasus-kasus korupsi, proses penyidikan, maupun pengenaan pasal-pasal tertentu. Di satu sisi, kredibilitas polisi diragukan untuk memberantas korupsi di internal mereka sendiri.<sup>10</sup> Budaya impunitas<sup>11</sup> terhadap korupsi polisi ini diperburuk oleh sikap beberapa institusi di Indonesia dianggap memfasilitasi korupsi polisi. Ditambah oleh kultur polisi yang berpengaruh destruktif pada petugas dan struktur polisi itu sendiri. Dilengkapi budaya dalam masyarakat Indonesia yang lebih luas bekerja untuk melanggengkan dan membatasi upaya pemberantasan korupsi polisi.<sup>12</sup> Penjelasan tersebut dengan tegas mengungkapkan sulitnya menjelaskan apa yang dimaksud korupsi serta ruang lingkungannya. Padahal, korupsi polisi sangat berdampak serius pada aspek kehidupan masyarakat secara luas. Disisi lain, problematika korupsi polisi ini menghadapi jalan terjal untuk diberantas karena berbenturan secara langsung secara kelembagaan. Selain persoalan institusional tersebut persoalan serius lainnya adalah sulitnya mengurai benang kusut korupsi polisi ini karena pengaruh langsung nilai-nilai budaya yang membentuk karakter polisi. Latar pemikiran seperti dijelaskan inilah yang menempatkan posisi strategi penelitian ini.

Dari uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini apakah penyebab dan bentuk korupsi yang dilakukan oleh petugas polisi di lapangan dan bagaimana strategi kontrol korupsi polisi agar bisa mewujudkan polisi bebas korupsi?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konsep, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Fokusnya pada naskah publikasi beberapa tahun terakhir

<sup>6</sup>Hidup Mewah Ala Korps Bhayangkara, <https://koran.tempo.co/read/opini/477693/dari-mana-gaya-hidup-mewah-polisi-berasal>

<sup>7</sup>Jenderal Polisi Cuma Dapat Gaji Lima Juta? Jumat, 12 Agustus 2022, <https://www.kompas.tv/article/318288/jenderal-polisi-cuma-dapat-gaji-lima-juta>

<sup>8</sup>Sorotan Presiden Jokowi kepada Polri, dari pungli hingga jelimahnya presisi, <https://sultra.antaranews.com/berita/431001/sorotan-presiden-jokowi-kepada-polri-dari-pungli-hingga-jelimetnya-presisi>

<sup>9</sup><https://nasional.kompas.com/read/2022/10/15/07472111/saat-jenderal-polisi-bintang-dua-terlibat-dugaan-peredaran-narkoba>.

<sup>10</sup>Teka-Teki Buku Merah: Antara Novel, KPK, dan Pertemuan di Pattimura”, <https://tirto.id/ejUa, IndonesiaLeaks-Desak-Kepolisian-Usut-Temuan-Baru-Kasus-Buku-Merah>, <https://nasional.tempo.co/read/1263118/indonesialeaks-desak-kepolisian-usut-temuan-baru-kasus-buku-merah>; Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/15015891/napoleon-bonaparte-jadi-terpidana-korupsi-statusnya-sebagai-perwira-aktif>;

<sup>11</sup>Indonesian Murder Trial Puts Spotlight On Police Impunity, October 17, 2022, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-murder-trial-puts-spotlight-police-impunity-2022-10-17/>

<sup>12</sup>Davies, Sharyn & Stone, Louise & Buttle, John. (2016). *Covering Cops: Critical Reporting Of Indonesian Police Corruption*, Pacific Journalism Review. 22. 185. 10.24135/Pjr.V22i2.61.

terkat tentang korupsi polisi. Dengan demikian fokusnya pada penelitian diperpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Unram.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Tipologi Korupsi Polisi

Dalam studi kriminologi, tipologi memiliki beberapa fungsi penting. Tipologi merujuk pada klasifikasi atau pengelompokan fenomena kriminologis berdasarkan karakteristik atau pola tertentu. Berikut adalah beberapa fungsi utama tipologi dalam studi kriminologi: Klasifikasi dan Pengelompokan: Tipologi membantu mengklasifikasikan berbagai jenis perilaku kriminal atau kejahatan ke dalam kelompok yang memiliki kesamaan dalam karakteristik atau motif tertentu. Ini memungkinkan peneliti dan kriminolog untuk memahami pola dan tren dalam kejahatan serta membedakan jenis-jenis kejahatan yang berbeda. Identifikasi Pola dan Tren: Dengan mengelompokkan kejahatan ke dalam kategori atau tipe tertentu, tipologi membantu dalam mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat jika setiap kejahatan dianalisis secara terpisah. Ini dapat membantu peneliti dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Pemahaman Terhadap Motif dan Karakteristik: Tipologi membantu mengungkapkan motif dan karakteristik umum yang mungkin menjadi pendorong perilaku kriminal. Dengan memahami apa yang mendasari kejahatan tertentu, peneliti dapat mencari cara-cara untuk mengatasi akar penyebabnya. Pembentukan Teori: Tipologi dapat membantu dalam pembentukan teori kriminologi. Dengan mengamati pola dan karakteristik kejahatan, peneliti dapat mengembangkan hipotesis dan teori tentang mengapa orang terlibat dalam perilaku kriminal tertentu. Pengembangan Kebijakan Kriminal: Tipologi membantu pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam mengembangkan kebijakan kriminal yang lebih efektif. Dengan memahami jenis kejahatan yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kebijakan dapat dirancang untuk mengatasi masalah kejahatan dengan lebih baik.

Evaluasi Program Pencegahan dan Intervensi: Tipologi dapat digunakan untuk menilai efektivitas program pencegahan dan intervensi. Dengan membandingkan jenis kejahatan dan profil pelaku sebelum dan setelah implementasi program, peneliti dapat menentukan apakah program tersebut berhasil atau perlu disesuaikan. Penelitian Lanjutan: Tipologi juga dapat membantu menentukan area penelitian lanjutan yang perlu dieksplorasi. Dengan mengidentifikasi jenis kejahatan yang kurang dipahami atau kurang diteliti, tipologi dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kriminologi. Secara keseluruhan, tipologi memiliki peran penting dalam studi kriminologi karena membantu mengorganisir, mengklasifikasikan, dan memahami berbagai jenis perilaku kriminal. Hal ini memungkinkan peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum untuk bekerja lebih efektif dalam mengatasi masalah kejahatan dan meningkatkan keamanan masyarakat.

Sejak Komisi Polisi AS pada tahun 1970-an, banyak ahli dan praktisi telah menghasilkan daftar jenis korupsi yang terjadi dalam tubuh kepolisian, yang disebut 'tipologi'. Biasanya, ini menunjukkan 20-40 masalah korupsi polisi yang berbeda-beda. Tipologi ini berasal dari Transparency International.<sup>13</sup> Penangkapan korupsi dalam polisi: pengalaman global dalam upaya reformasi korupsi polisi) dan mengidentifikasi 34 jenis korupsi dalam layanan polisi dalam lima kategori, mulai dari korupsi politik tingkat strategis hingga korupsi 'di lapangan' dalam operasi.

Berikut ini adalah ringkasan gambar dari jenis-jenis korupsi tersebut, yang merupakan cara yang paling mudah untuk mengkomunikasikan jenis-jenis korupsi ini kepada audiens:

---

<sup>13</sup>Pyman et al 2012

Membendung Korupsi dalam Layanan Polisi: Pengalaman dan Strategi Reformasi Sektor. Pyman mendiskripsikan secara lengkap 10 Deskripsi lengkap dari 34 jenis korupsi polisi.”<sup>14</sup>

No	Kategori/ Jenis Korupsi Deskripsi	Politik
1	Biased domestic policing strategy	Poorly conceived strategy/policy can serve as the entry-point for high level corruption: a vague or unpublished policy not only sets the wrong ‘tone from the top’ but can encourage individual divisions within the organisation to be opaque in their dealings
2	Improper allocation & distribution of funds	The process through which money is allocated must be transparent accountable and thorough. Funds should be earmarked and distributed according to public and institutional needs.
3	Political interference	Politicisation of a force violates the necessary independence required for effective rule of law. Such interference can lead to high-level government officials influencing key decisions taken by those on the ground
4	Malign influence of interest groups	A small group may control the police for their own group’s interests therefore undermining the police’s role as a service provider for all.
5	Penetration by organised crime	Organised crime penetrates police establishments through means such as facilitating protection from prosecution, turning a blind eye to illegal activities, or in the worst cases, active involvement of officers.
6	Unreasonable performance targets	Political requirements to attain unrealistic targets in policing may encourage officers to alter statistics to make them appear more favourable.
7	Purposefully weak oversight	Weak and partial oversight can reduce public confidence in the police if corruption allegations are inadequately addressed and improperly punished. Inadequate monitoring can lead to greater willingness to participate in corrupt activities
		Finance
8	Improper asset disposals	Illegal selling or disposal of assets in collusion with the purchaser without proper authority. Assets may outlive the purpose for which they were intended but remain valuable in monetary terms.
9	Weak financial control	Poor controls, especially over travel and expenses, are easily exploited by officers.
10	Private business	Police groups or individuals using police resources to run private enterprises
11	Misuse of resources for private security	Police personnel operating for profit by providing protection to groups or individuals.
12	Facilitation payments	A payment made to secure or expedite the performance of a routine action to which the payer has legal entitlement.
		Personnel

<sup>14</sup>Roebuck, J. B., & Barker, T. (1974). A typology of police corruption. *Social Problems*, 21(3), 423–437. <https://doi.org/10.1525/sp.1974.21.3.03a00100>

13	Poor leadership behaviour	Poor attitudes towards corruption and professional integrity have a rapid effect across the service. This is especially strong in policing, due to the inherent hierarchical command structure.
14	Nepotism: Abuse of payroll, promotions, rewards, appointments	HR system functioning based on favouritism and/or bribery
15	Salary chain theft	Corrupt extraction of money due for police officer salaries from the passage of funds from treasury to ministry to local police forces
	Integrity failures	Failure of values and standards
	Criminal activities	Where officers are directly involved in illegal activities in collusion with others
	Personal problems	Corruption due to officers open to extortion and/or in need of money to fund their habit. (e.g. drugs, gambling, being blackmailed)
19	False asset declaration	Knowingly false declarations of personal assets to hide corrupt proceeds
20.	Rotations: Lack of rotations, or showing favour in desirable rotations	Lack of rotation between roles and locations, especially higher risk positions, allow corruption opportunities to develop
		Procurement
21	Biased technical requirements/ specifications	It can be easy for officers or others within the procurement process to abuse their position by biasing the tender specification in favour of a particular bidder.
22.	Improper contract award/ execution	There are many specific corruption issues within contract award and execution.
23.	Misuse of confidential tenders	Sometimes there are valid reasons for restricting tenders from being open and competitive; however, corruption is easier in such situations
	Behaviour & operations	
24.	Evidence tampering & theft	Planting, removing, or altering evidence all undermine the proper investigative process
25	Small bribes	Often cited by the public as the most common and visible manifestation of police corruption. Despite being small, they corrode the trust between the police service and the public
26.	Uncontrolled operational independence	Police structures which give individual officers a high degree of operational independence still require a mechanism to ensure compliance with police codes of conduct and adherence to the rule of law.

27.	‘ Noble cause’	The use of corrupt or illegal means to achieve goals, such as a conviction, which are believed to be legitimate and worthy
28	Illegal fines	Abuse of power in carrying out an official police function for personal profit
29.	Disclosure of privileged information	Abusing the trust of the public by improperly handling sensitive and private information for personal gain.
30.	Misuse of informants	Abuse of the relationship between informant and police officer, for personal gain. Additionally, due to low oversight, officers may add ‘ghost’ informants to misallocate police funds
31.	Discriminating behaviour	Socio-cultural factors may lead to unfair and biased treatment of certain individuals. Apart from fostering tensions between social groups, such behaviour undermines trust in the police service.
32.	Extortion	Abuse of a privileged position to enforce the rule of law to extract personal gain through intimidation and reprisals
33.	Lack of officer identification	Clearly identifiable names and police numbers reduce the risk of officers abusing their position and operational independence
34.	Inaction due to ‘Bonds of loyalty’	Camaraderie often prevents whistle-blowers from exposing incidents of corruption. Those who bring to light the malpractice of fellow officers may likely need protection from retribution.

Beberapa penulis lain juga telah menyusun daftar masalah korupsi polisi, dan mungkin juga berdasarkan definisi hukum tentang korupsi, jika mereka diformulasikan dengan tepat. Ada empat jenis tipe seperti itu yang ditampilkan di bawah ini:

### 1.1. Typology dari Roebuck (1974) Kemudian diamandemen oleh Punch (1985)

Corruption of authority	When an officer receives some form of material gain by virtue of their position as a police officer without violating the law per se (e.g. free drinks, meals, services).
‘Kickbacks’	Receipt of goods, service, or money for referring business to individuals or companies
Opportunistic theft	Stealing from arrestees (sometimes referred to as ‘rolling’), from traffic accident victims, crime victims and the bodies or property of dead citizens.
‘Shakedown’	Acceptance of a bribe for not following through a criminal violation (e.g. not making an arrest, filing a complaint or impounding property)
Protection of illegal activities	Police protection of those engaged in illegal activities (e.g. prostitution, drugs, pornography) enabling the business to continue operating
‘The fix’	Undermining of criminal investigations or proceedings, or the ‘losses of traffic tickets.
Direct criminal activities	A police officer commits a crime against person or property for personal gain ‘in clear violation of both departmental and criminal norms’.
Internal payoffs	Prerogatives available to police officers (e.g. holidays, shift allocations, promotion) are bought, bartered and sold.

'Flaking' or 'padding'	Planting of or adding to evidence (argued by Punch to be particularly evident in drugs cases).
------------------------	--

## 1.2. Typology from Barker (1983)<sup>15</sup>

Studi yang mengusulkan tipologi korupsi polisi yang dijelaskan di atas oleh Barker didasarkan pada kepentingan untuk memahami fenomena korupsi di dalam kepolisian. Latar belakang studi ini melibatkan sejumlah faktor dan pertimbangan: Kebutuhan untuk Memahami dan Mengatasi Korupsi Polisi: Korupsi dalam kepolisian adalah masalah yang serius dan memiliki dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Untuk mengatasi korupsi, penting untuk memahami motivasi dan karakteristik tindakan korupsi polisi agar strategi pencegahan dan penegakan hukum yang efektif dapat dikembangkan.

Persebaran Korupsi Polisi: Korupsi polisi dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan konteks. Oleh karena itu, penting untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai jenis tindakan korupsi untuk memahami perbedaan antara mereka dan mengidentifikasi pola yang mungkin ada di baliknya. Perbedaan Motif: Studi ini mencoba membedakan antara motif di balik tindakan korupsi, seperti keinginan untuk mencapai "tujuan mulia," peluang yang muncul, atau budaya korupsi yang meluas di dalam lembaga polisi. Memahami motif ini dapat membantu dalam merancang pendekatan yang tepat untuk mencegah dan mengatasi korupsi.

Dukungan bagi Perbaikan Polisi: Studi ini juga dapat memberikan wawasan kepada departemen kepolisian dan pembuat kebijakan tentang bagaimana mereka dapat memperbaiki budaya organisasi mereka, memberikan pelatihan yang sesuai, dan mengembangkan tata kelola yang lebih baik untuk mencegah korupsi.

Dampak pada Masyarakat: Korupsi polisi tidak hanya merugikan integritas kepolisian, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap kepolisian mungkin kurang cenderung berkolaborasi dengan polisi atau melaporkan kejahatan, yang dapat mengganggu keamanan umum. Oleh karena itu, latar belakang studi ini adalah kepentingan dalam memahami, mengklasifikasikan, dan mengatasi korupsi polisi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan memelihara integritas dalam kepolisian. Studi ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang dapat membantu peneliti, pembuat kebijakan, dan praktisi hukum untuk lebih baik memahami dinamika korupsi polisi dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengatasinya.

Corruption (Involves a material reward or gain)	Misconduct (No material reward or gain)	
Corruption of authority	Opportunistic thefts	Police perjury
Shakedown	Protection of illegal activities	Police brutality
Traffic fix	Misdemeanour fix	Sex on duty
	Kickbacks	Drinking on duty
		Sleeping on duty
		Other violations
		Felony fix

Dalam hal praktik utama korupsi polisi, ada beberapa tipologi yang mengidentifikasi sembilan aktivitas (yang juga tumpang tindih dengan ketidakpatuhan (*police deviance*) dan perilaku tercela polisi (*misconduct*)).

<sup>15</sup>Curbing Corruption in Police services: Sector reform experience and strategies. Pyman (2021) <https://curbingcorruption.com/wp-content/uploads/2021/06/210618-Curbing-Corruption-in-Police-services.pdf>



1. Corruption of authority—attaining perks without contravening the law, such as receiving free meals, beverages, and services.
2. Kickbacks—money, services, or goods obtained for business referrals promoting a company or individual.
3. Opportunistic theft—stealing from people who have been arrested, engaged in accidents, or from victims or deceased persons.
4. Turning a blind eye—bribes undertaken for omitting a felony, arrest, or seizure of property.
5. Protection of illegal activities—protecting criminal groups or individuals engaged in illegal practices, such as protection rackets (drugs, gambling, and prostitution rings) in vice areas.
6. Fixing—undermining criminal investigation or deliberately losing traffic or speeding tickets.
7. Direct criminal activities—engaging in a crime against an individual or property to attain individual advantage.
8. Internal payoffs—when promotions, annual leave, and shift allocations are bought, traded, and vended.
9. Adding or planting of evidence—when evidence is planted to frame an individual or group, which is usually within drug cases.<sup>16</sup>

Sembilan praktik korupsi polisi ini berfungsi sebagai tipologi dan memiliki hierarki, dengan satu sebagai bentuk korupsi polisi yang paling tidak serius dan sembilan sebagai yang paling serius. Ada perdebatan mengenai seberapa parah korupsi polisi yang meningkat seiring waktu selama karier seorang petugas polisi.<sup>17</sup> Sherman menggunakan analogi “lereng licin” untuk berargumen bahwa petugas polisi mungkin mulai menerima gratifikasi kecil, seperti kopi gratis atau makanan diskon, pada awal karier mereka dan secara bertahap terlibat dalam bentuk-bentuk korupsi polisi yang lebih serius.<sup>18</sup> Dengan kata lain, rekrutan baru internalisasi nilai-nilai dari rekan atau pelatih berpengalaman mereka dan mengadopsi kebiasaan serupa yang meningkat seiring waktu.

Meskipun literatur tentang aktivitas, tipologi, dan sosialisasi korupsi polisi telah banyak dipelajari, motif dan tujuan pelanggaran polisi juga perlu dipahami. Karya Newburn mengusulkan bahwa menganalisis motif dan hasil potensial perilaku polisi dapat diperkuat dan bahkan diperkuat sebagai perilaku yang dapat diterima dalam sebuah departemen polisi. Berbagai studi tentang pelanggaran polisi menemukan bahwa kejahatan yang didorong oleh keuntungan adalah praktik utama dari pelanggaran polisi. Dalam sebuah studi yang dilakukan dengan Departemen Polisi Kota New York (NYPD),<sup>19</sup> Kane dan White menemukan bahwa penerimaan suap merupakan kasus pelanggaran polisi yang paling menguntungkan dari 387 ‘pelanggaran polisi yang mengakhiri karier’ petugas NYPD.<sup>20</sup> Dalam studi nasional di AS, Stinson dkk. Pada tahun 2018 menekankan ‘kejahatan polisi yang didorong oleh keuntungan’ yang melibatkan 1.396 petugas polisi yang menyalahgunakan otoritas mereka untuk keuntungan pribadi. Sebagian besar pelaku kejahatan yang didorong oleh keuntungan terkait dengan polisi patroli ‘saat bertugas’ yang juga termasuk dalam kasus kejahatan terkait narkoba, kekerasan, seks, dan alcohol.<sup>21</sup> Dalam survei enam kali lipat dan sembilan kelompok fokus tentang kepolisian di Rusia oleh Gerber dan Mendelson,<sup>22</sup> polisi bersifat predator di mana petugas-polisi menyalahgunakan otoritas mereka untuk mengejar kepentingan material pribadi daripada menjaga keamanan internal atau melindungi kepentingan elit yang merusak kepercayaan publik terhadap kepolisian dan pengadilan. Temuan ini mengenai penurunan

<sup>16</sup>Roebeck and Barker 1974; Punch 1985; Carter 1990; Sayed and Bruce 1998; Barker 2006

<sup>17</sup>Kleinig 1996, hlm. 163–67

<sup>18</sup>Sherman, 1985

<sup>19</sup>Newburn 1999

<sup>20</sup>Kane dan White, 2013, hlm. 73.

<sup>21</sup>Stinson dkk. 2018, hlm. 319.

<sup>22</sup>Gerber dan Mendelson, 2008.

kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan peradilan serupa dengan Amerika Serikat ketika korupsi polisi terungkap. Namun, dalam konteks Rusia, polisi bersifat predator juga menghambat reformasi demokratis.

Meskipun korupsi polisi sebagian besar dikaitkan dengan keuntungan individu, dan bahkan departemen ketika mempertimbangkan korupsi berdasarkan “tujuan mulia” dan pemalsuan sumpah, pada tahun 2011 melalui penelitiannya Bayley dan Perito memperluas definisi untuk mencakup pelanggaran aturan tanpa keuntungan finansial, seperti penyalahgunaan tahanan, rasisme, dan perilaku seksual.<sup>23</sup> Huberts telah menyajikan pelanggaran integritas yang mencakup korupsi polisi, pencurian dan penipuan, janji dan hadiah yang tidak pasti, bekerja secara sampingan (bekerja di pekerjaan sampingan yang tidak diumumkan), penyalahgunaan informasi, mengintimidasi warga dan rekan-rekan, penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan baik yang dibenarkan (korupsi berdasarkan “tujuan mulia”), penyalahgunaan dan pemborosan sumber daya, dan pelanggaran hukum di luar jam kerja dan tugas.<sup>24</sup> Meskipun pelanggaran integritas yang terdaftar ini tumpang tindih dengan korupsi polisi, ketidakpatuhan, pelanggaran, dan etika, mereka meragikan setiap kepolisian.<sup>25</sup>

## 2. Strategi Kontrol Pemberantasan Korupsi Polisi

### 2.1. Pengalaman Berhadapan dengan Korupsi Polisi

Korupsi polisi dapat berdampak jauh. Ketika fungsi dasar hukum dan ketertiban terganggu oleh praktik korup dalam kepolisian, negara tidak dapat secara sah mencegah dan menghukum pelanggaran hukum atau melindungi hak asasi manusia.<sup>26</sup> Korupsi dalam polisi mengakibatkan ketidakpercayaan publik terhadap polisi, sehingga menjadi lebih sulit bagi polisi untuk menjalankan tugas utama mereka, yaitu menindak kejahatan.<sup>27</sup> Ini mengompromikan integritas institusional sistem kepolisian dan merusak legitimasinya.<sup>28</sup> Lebih lanjut, jika publik harus menghormati hukum, mereka harus yakin bahwa polisi mematuhi hukum secara umum, dan bahwa dalam menerapkan hukum, mereka memperlakukan semua orang secara adil.<sup>29</sup>

Beberapa analis memperingatkan bahwa tidak ada satu strategi anti-korupsi tunggal yang telah cukup untuk sepenuhnya mengatasi korupsi polisi. Masalah yang kompleks ini memerlukan solusi yang sama kompleksnya, dan kedua, tidak mungkin ada solusi mutlak yang dapat dicapai, meskipun pengurangan besar dalam jumlah kasus mungkin dapat terjadi.<sup>30</sup>

Indonesia pada peringkat 18 pada index Persepsi Korupsi Polisi Indonesia<sup>31</sup> maka diperlukan sebuah strategi anti-korupsi yang holistik, bukan linear, memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan upah untuk mencegah bentuk korupsi kecil, menginstal lembaga anti-korupsi independen, dan secara berkala mengrotasi petugas polisi untuk meningkatkan integritas dan loyalitas polisi terhadap negara tuan rumah. Disarankan bahwa strategi pencegahan yang beragam ini diperlukan dalam kepolisian yang dihadapkan pada masyarakat

<sup>23</sup>Bayley dan Perito 2011, hlm. 3

<sup>24</sup>Huberts 1998, hlm. 28–30.

<sup>25</sup>Singh 2020a, hlm. 26.

<sup>26</sup>Pyman, N et al. 2012. Arresting Corruption in the Police: The Global Experience of Police Corruption Reform Efforts.

<sup>27</sup>DCAF 2012 dalam Pyman, N et al. 2012. Arresting Corruption in the Police: The Global Experience of Police Corruption Reform Efforts.

<sup>28</sup>Hope, K.R. 2015. Police corruption and police reforms in developing societies.

<sup>29</sup>DCAF. 2012. Toolkit on Police Integrity.

<sup>30</sup>Best practices in addressing policerelated corruption The police force is commonly identified as one of the most corrupt governmental institutions. The cases of Hong Kong, Georgia and Singapore highlight how determined police administrations, continuous political commitment, and an anti-corruption approach with wide alliances between the public, private and civil society sectors, can make a huge difference in anticorruption reform efforts Author(s): Krista Lee-Jones U4 Anti-Corruption Helpdesk A free service for staff from U4 partner agencies, <https://www.u4.no/publications/best-practices-in-addressing-police-related-corruption.pdf>

<sup>31</sup> <https://www.indexmundi.com/surveys/results/1>

yang terbagi secara kekerasan untuk memperkuat dukungan publik dan mencegah dukungan bagi kelompok-kelompok oposisi anti-pemerintah bersenjata.”<sup>32</sup>

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh ahli di berbagai Negara menghasilkan berbagai rekomendasi konkret untuk mengurangi korupsi. Rekomendasi-rekomendasi ini mencakup reformasi dalam budaya polisi, manajemen, rekrutmen, pelatihan, proses disiplin, dan aspek lingkungan eksternal. Salah satu reformasi yang paling sering ditekankan adalah penciptaan pengawasan eksternal permanen terhadap polisi, dengan fokus khusus pada pemantauan perilaku buruk petugas polisi. Pentingnya komisi-komisi ini mengakui bahwa penyelidikan sekali saja tidak cukup untuk mengatasi masalah yang merajalela. Hal ini diperkuat oleh komitmen komisi-komisi untuk melindungi para pengungkap pelanggaran dan meningkatkan audit internal proses operasional, terutama terkait properti yang disita dan penanganan informan. Rekomendasi kedua yang sering disebutkan adalah mengenai tanggung jawab para pengawas terhadap integritas bawahannya, reformasi promosi berdasarkan prestasi dan penugasan, perubahan budaya polisi, pembentukan program pelatihan integritas bagi calon polisi dan personel yang sudah bekerja, terutama para supervisor tingkat pertama. Selain itu, pentingnya menciptakan unit pemantauan integritas internal yang efektif, evaluasi tahunan terhadap integritas semua petugas, menjadikan kepala polisi bertanggung jawab atas penegakan disiplin, penyelidikan proaktif terhadap perilaku buruk, serta peningkatan standar dalam rekrutmen dan pelatihan.

Namun, analisis dan rekomendasi di atas, termasuk pembentukan pengawasan eksternal. Secara efektif, tidak ada konsensus besar tentang reformasi; mengurangi korupsi melibatkan perubahan di banyak bidang. Implikasi yang jelas adalah bahwa upaya untuk mengurangi korupsi polisi harus didasarkan pada analisis perbedaan dalam siapa, apa, dan kapan korupsi lokal terjadi. Konteks yang berbeda akan memerlukan solusi yang berbeda.

Di balik rekomendasi untuk mengubah budaya polisi secara umum, beberapa komisi merinci toleransi luas terhadap kode kesunyian di antara petugas polisi dan keraguan untuk memberi tahu tentang rekan-rekan mereka. Komisi juga menyebut sikap “kami melawan mereka” dari polisi terhadap publik. Beberapa laporan menyoroti kegagalan kepemimpinan dan pengawasan di semua tingkatan. Penyelidik sering kali berpikir bahwa perwira senior gagal bertanggung jawab atas perilaku korup, bahkan ketika mereka mengetahuinya. Frasa “ketidaktahuan yang sengaja” muncul beberapa kali, disertai dengan praktik menyalahkan beberapa “apel busuk.” Akhirnya, komisi sering kali sangat mengkritik sistem disiplin internal, meskipun mereka memiliki sedikit saran konkret untuk perbaikan selain menyediakan lebih banyak uang dan menunjuk orang yang lebih terlatih.

Ada pola yang umum bahwa korupsi polisi, tersebar merata di departemen kepolisian tetapi terkonsentrasi di unit yang berurusan dengan pengaturan dan pemberantasan kejahatan. Mereka sering merekomendasikan pelatihan integritas yang ditingkatkan untuk petugas yang ditugaskan ke unit-unit tersebut, serta perhatian terhadap rekrutmen dan lamanya penugasan. Komisi sering tidak konsisten dalam cara mereka mengoperasikan istilah korupsi, apakah itu merujuk pada perilaku yang meraih keuntungan pribadi atau untuk tujuan terhormat seperti pengendalian kejahatan. Menurut beberapa laporan dari berbagai komisi penyelidik anti korupsi memberikan pernyataan bahwa korupsi karena tujuan mulia adalah tempat lahirnya korupsi sistematis yang terkukuh. Jika sebuah kepolisian ingin membebaskan diri dari korupsi, maka harus mengatasi korupsi karena tujuan mulia.

Reformasi yang disepakati meliputi pembentukan pengawasan eksternal permanen yang khusus; perhatian yang lebih besar untuk mengembangkan iklim moral dalam kepolisian

<sup>32</sup>Danny Singh, *The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-Stricken State*, <https://www.mdpi.com/2075-471X/11/5/69>

yang mendukung pengaturan diri yang efektif; penerimaan oleh polisi bahwa korupsi adalah hal yang tak terhindarkan dan memerlukan antisipasi proaktif yang terus-menerus; tuntutan agar para pengawas dari semua tingkatan memberikan contoh dan dorongan; dan tekad untuk meminta pertanggungjawaban semua perwira komando atas perbuatan salah bawahan mereka. Konsensus tentang reformasi korupsi polisi ini melibatkan serangkaian solusi administratif yang pada dasarnya dapat dijalankan oleh kepolisian. Dengan kata lain, di bawah pengawasan eksternal permanen, reformasi akan terjadi dengan mengubah cara pengelolaan kepolisian.

## 2.2. Pengetahuan tentang Bentuk dan Penanggulangan Korupsi Polisi Terbatas oleh Konteks

Pengetahuan tentang bentuk dan cara mengatasi korupsi polisi ternyata sangat terbatas dalam cakupannya. Dari tiga puluh dua komisi khusus yang menyelidiki kepolisian di negara-negara berbahasa Inggris, tiga belas di antaranya berada di Amerika Serikat, enam di Australia, tiga di Inggris, empat di Kanada, dan satu di India, Irlandia, Kenya, Malaysia, Uganda, dan Israel masing-masing. Hanya empat dari komisi-komisi ini—India, Kenya, Malaysia, dan Uganda—berasal dari dunia berkembang. Dengan kata lain, pengetahuan yang menjadi dasar literatur sekunder dan menjadi landasan bagi strategi yang direkomendasikan oleh komunitas internasional, sebagian besar didasarkan pada pengalaman negara-negara Barat—terutama Australia dan Amerika Serikat. Tujuh belas dari tiga puluh dua komisi yang fokus pada kepolisian secara umum dan tujuh dari sepuluh komisi yang fokus secara khusus pada korupsi berasal dari dua negara tersebut. Selain itu, ketiga komisi Amerika yang mengatasi korupsi polisi menangani eksklusif kasus di Kota New York.

Mengapa penyelidikan berkelas dunia yang independen dari pemerintah di negara-negara berbahasa Inggris didominasi oleh beberapa negara saja? Salah satu penjelasan yang jelas mungkin adalah bahwa hal ini mencerminkan perbedaan dalam insiden korupsi polisi. Secara sederhana, polisi Amerika dan Australia mungkin lebih korup daripada polisi di tempat lain. Namun, penjelasan ini tidak didukung oleh bukti internasional.<sup>17</sup> Sangat diragukan bahwa Australia dan Amerika Serikat begitu jauh lebih buruk daripada negara-negara berbahasa Inggris yang berkembang lainnya atau bahwa Kota New York begitu jauh lebih buruk daripada Philadelphia, Chicago, atau Los Angeles.

Penjelasan yang lebih masuk akal adalah bahwa respons investigatif terhadap korupsi polisi sangat bervariasi dan tidak mencerminkan insiden korupsi atau keprihatinan publik terhadapnya. Distribusi mereka menunjukkan bahwa yurisdiksi berbeda secara tajam dalam hal apakah investigasi luar biasa diperlukan. Penanggulangan korupsi polisi tampaknya bergantung pada dinamika politik dan tradisi lokal, serta mungkin kapasitas yurisdiksi lokal untuk mengelolanya. Saat ini, tidak ada penelitian yang menjelaskan variasi respons resmi terhadap tuduhan korupsi polisi. Jika benar, seperti yang ditunjukkan oleh data, bahwa cara investigasi korupsi polisi bergantung pada konteks, maka upaya internasional untuk mengatasi korupsi semacam itu di negara-negara tertentu akan memerlukan penilaian lokal terhadap tradisi dan kapasitas. Upaya komisi berkelas dunia yang independen dan hanya dilakukan sekali mungkin menjadi fenomena khas Barat, dan belum tentu universal bahkan di sana.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>David Bayley and Robert Perito Police Corruption What Past Scandals Teach about Current Challenges, <https://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR%20294.pdf>, hlm. 2.

**Tabel 4.1 Strategi untuk Mengatasi Korupsi dan Menjaga Integritas dalam Badan Kepolisian**

Internal/external	Strategies	Detail
Primarily internal	1. Institutional reform	Covering a range of reforms (highlighted below) and often involving a flattening of hierarchies
	2. Detection and investigation	May be reactive (from intelligence or complaints) or proactive (from examination of records to integrity testing)
	3. Discipline and punishment of corrupt officers	From administrative discipline through to prosecution. Intention is both to punish and to deter
	4. Encourage reporting of misconduct/'whistleblowing'	Make every effort to break the 'blue wall of silence'; provide genuine support for 'whistleblowers'
	5. Monitor propensity for corruption	Increasingly organisations are monitoring 'risks', from the time of recruitment/selection, throughout officers' careers
	6. Enhance recruitment & selection procedures	Significant reform of the recruitment/selection process, with particular emphasis on integrity
	7. Enhance training of officers	In particular around ethics and integrity. Do officers understand the rules and expectations?
	8. Set official policies and enforce them	Wherever possible, clarity about expectations of officers is crucial. Not only must it be clear, but such standards must be enforced if they are to be taken seriously
	9. Establish robust internal supervision and accountability	A multitude of studies from a range of countries show failure of oversight to be a crucial element in problems of corruption
	10. Provide resources for control	There is little point in forces talking seriously about corruption control unless they have sufficient resources to deal with the issue
	11. Limit opportunities for corruption	Manage and monitor those areas of work where the risks of corruption are greatest
	12. Cultivate culture intolerant of corruption	Clear leadership at all levels promoting ethical conduct and encouraging the reporting of misconduct.

Primarily external	13. Establish robust external supervision and accountability	Ensuring effective democratic oversight and control of local policing, including oversight of control efforts
	14. Detect and investigate corruption not investigated by the police agency	Support and where possible enhance the ability of external scrutiny bodies to examine allegations of misconduct and corruption
	15. Disseminate information about corruption and its control	Collect and disseminate robust information about levels and types of misconduct and responses to such behaviour

#### D. KESIMPULAN

Penyebab korupsi yang dilakukan oleh petugas polisi di lapangan terjadi karena didorong untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perilaku korupsi polisi ini disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat agensi dan struktural. Pekerjaan segelintir petugas polisi yang tidak jujur dan tidak bermoral atau bisa juga salah satu petugas yang korup dengan piagam yang buruk pelanggaran tersebar luas di sebuah lembaga, departemen, dan/atau unit karena kebijakan dan praktik yang lemah dan tidak efektif yang mempromosikan pelanggaran. Ditambah oleh kultur polisi yang berpengaruh destruktif pada petugas dan struktur polisi itu sendiri. Dilengkapi budaya dalam masyarakat Indonesia yang lebih luas bekerja untuk melanggengkan dan membatasi upaya pemberantasan korupsi polisi. Korupsi atau pelanggaran polisi dapat mencakup pelanggaran kebijakan apa pun seperti pelecehan fisik terhadap tahanan, sumpah palsu, profiling yang bersifat rasial, dan serangan seksual. Strategi kontrol korupsi polisi agar bisa mewujudkan polisi bebas korupsi mencakup reformasi dalam budaya polisi, manajemen, rekrutmen, pelatihan, proses disiplin, dan aspek lingkungan eksternal. Salah satu reformasi yang paling sering ditekankan adalah penciptaan pengawasan eksternal permanen terhadap polisi, dengan fokus khusus pada pemantauan perilaku buruk petugas polisi. Pentingnya komisi-komisi pengawas ini mengakui bahwa penyelidikan sekali saja tidak cukup untuk mengatasi masalah yang merajalela. Hal ini diperkuat oleh komitmen komisi-komisi untuk melindungi para pengungkap pelanggaran dan meningkatkan audit internal proses operasional, terutama terkait properti yang disita dan penanganan informan. Reformasi promosi berdasarkan prestasi dan penugasan, perubahan budaya polisi, pembentukan program pelatihan integritas bagi calon polisi dan personel yang sudah bekerja, terutama para supervisor tingkat pertama. Selain itu, pentingnya menciptakan unit pemantauan integritas internal yang efektif, evaluasi tahunan terhadap integritas semua petugas, menjadikan kepala polisi bertanggung jawab atas penegakan disiplin, penyelidikan proaktif terhadap perilaku buruk, serta peningkatan standar dalam rekrutmen dan pelatihan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Davies, Sharyn & Stone, Louise & Buttle, John. (2016). *Covering Cops: Critical Reporting Of Indonesian Police Corruption*, Pacific Journalism Review. 22. 185. 10.24135/Pjr.V22i2.61.

Danny Singh, *The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-*

*Stricken State*, <https://www.mdpi.com/2075-471X/11/5/69>

David Bayley and Robert Perito, *Police Corruption What Past Scandals Teach about Current Challenges*, <https://www.usip.org/sites/default/files/resources/SR%20294.pdf>,

Francis Pakes, *Comparative Criminal Justice*, 2nd Edition, Willan Publishing, 2010.

H. Goldstein, *Policing A Free Society*. Cambridge, MA: Ballinger, 1977.

Hope, K.R. *Police Corruption And Police Reforms In Developing Societies*, 2015.

John W. Buttle, Sharyn Graham Davies, Adrianus Eliasta Meliala, *A Cultural Constraints Theory of Police Corruption: Understanding The Persistence Of Police Corruption In Contemporary Indonesia, Australian and New Zealand*, *Journal of Criminology*, September, 2016.

J.S.T. Quah, *Combating Police Corruption In Indonesia: Cleansing The Buaya (Crocodile)*, *Asian Education And Development Studies*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 129-143. <https://doi.org/10.1108/AEDS-04-2018-0088>;

Krista Lee-Jones U4 Anti-Corruption Helpdesk A free service for staff from U4 partner agencies, <https://www.u4.no/publications/best-practices-in-addressing-police-related-corruption.pdf>

M Punch, *Police Corruption: Deviance, Accountability And Reform In Policing*, Cullompton: Willan, 2009;

Pyman, N et al. *Arresting Corruption in the Police: The Global Experience of Police Corruption Reform Efforts*. 2012.

Sanja Kutnjak vkovi, Irena Cajner-Mraovi, *The Measurement Of Seriousness Of Police Corruption*, This paper appears in *Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice*, edited by Gorazd Mesko, Milan Pagon, and Bojan Dobovsek, and published by the Faculty of Criminal Justice, University of Maribor, Slovenia. <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/Mesko/207997.pdf>

### Internet

Hidup Mewah Ala Korps Bhayangkara, <https://koran.tempo.co/read/opini/477693/dari-mana-gaya-hidup-mewah-polisi-berasal>

Jenderal Polisi Cuma Dapat Gaji Lima Juta? Jumat, 12 Agustus 2022, <https://www.kompas.tv/article/318288/jenderal-polisi-cuma-dapat-gaji-lima-juta>

Sorotan Presiden Jokowi kepada Polri, dari pungli hingga jelimetnya presisi, <https://sultra.antaranews.com/berita/431001/sorotan-presiden-jokowi-kepada-polri-dari-pungli-hingga-jelimetnya-presisi>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/15/07472111/saat-jenderal-polisi-bintang-dua-terlibat-dugaan-peredaran-narkoba>.

Teka-Teki Buku Merah: Antara Novel, KPK, dan Pertemuan di Pattimura”, <https://tirto.id/ejUa>, *IndonesiaLeaks Desak Kepolisian Usut Temuan Baru Kasus Buku Merah*, <https://nasional.tempo.co/read/1263118/indonesialeaks-desak-kepolisian-usut-temuan-baru-kasus-buku-merah>; Napoleon Bonaparte Jadi Terpidana Korupsi, Statusnya sebagai Perwira Aktif Polri Dipertanyakan, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/20/15015891/napoleon-bonaparte-jadi-terpidana-korupsi-statusnya-sebagai-perwira-aktif>;

Indonesian Murder Trial Puts Spotlight On Police Impunity, October 17, 2022, <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesian-murder-trial-puts-spotlight-police-impunity-2022-10-17/>